

## **SBY Abaikan Penegakan HAM = Melanggengkan Pelanggaran HAM**

Sudah 23 kali, kami para korban menggelar aksi diam kamisan di depan Istana negara. Kami merasa sangat kecewa dengan sikap yang selama ini ditunjukkan oleh seorang presiden yang hanya diam dalam menghadapi tuntutan Korban Pelanggaran HAM. Sampai saat ini kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu belum satupun yang dituntaskan.

Arah politik dan Penegakan HAM semakin tidak jelas. Padahal, SBY telah berkali-kali berbicara tentang komitmennya untuk menuntaskan kasus-kasus HAM masa lalu. Baik itu di forum nasional, maupun internasional. Namun, itu hanyalah sebuah pernyataan politik saja, tanpa realisasi yang jelas. Dalam hal ini, kami menuntut pertanggungjawaban kepada Bapak Presiden SBY selaku pemegang pemerintahan tertinggi negara ini.

Penuntasan Kasus Trisakti, Semanggi I, dan II (TSS), penculikan aktifis 1997-1998, Pembunuhan Munir, Tanjung Priok 1984, Talangsari (Lampung), dan tragedi 1965 yang sama sekali belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Bapak Presiden SBY harusnya memiliki ketegasan terhadap kasus-kasus tersebut. Kasus TSS misalnya, yang sampai saat ini menjadi perdebatan antara DPR dan Kejaksaan Agung mengenai pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc. Tetapi, SBY lebih memilih diam.

Padahal, Indonesia sebulan yang lalu terpilih kembali sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2007-2010. Dengan dukungan suara terbanyak kedua setelah India dalam sidang Majelis Umum PBB yang bermarkas di New York. Selain anggota Dewan HAM, Indonesia juga menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Dengan adanya posisi yang strategis di Dewan HAM, SBY seharusnya melakukan pembenahan terhadap penegakan HAM di Indonesia dengan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu sebagai bukti bahwa Indonesia betul-betul menghargai HAM.

Bapak Presiden SBY jangan lagi mengabaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Sebab, akan mejadi sebuah preseden buruk dalam penegakan HAM dan melanggengkan praktik pelanggaran HAM. Ini terbukti dengan terulangnya berbagai pelanggaran HAM oleh aparat TNI AL di Alas Tlogo, Pasuruan, yang mengakibatkan jatuh korban jiwa rakyat yang tidak berdosa. Sampai kapan kekerasan di negara ini berhenti, kami sudah bosan mendengar berita, cerita, dan suka cita tentang praktik-praktik kekerasan. Hal ini dikarenakan para penjahat HAM tidak ada satupun yang di adili didepan hukum, dan praktik impunitas yang masih langgeng. Pengadilan HAM Ad Hoc yang sudah digelar tidak mampu memberikan keadilan bagi korban. Dalam kasus Tanjung Priok misalnya, semua terdakwaanya dibebaskan.

SBY harus membuktikan komitmennya dalam penegakan HAM dengan menuntaskan semua kasus pelanggaran HAM masa lalu. Masa depan bangsa ini akan lebih baik apabila SBY mampu membereskan persoalan yang terjadi di masa lalu. Sehingga tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai ketidakadilan yang diadakan dan ketidakbenaran yang dibenarkan.